



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD 2018

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

a. Ringkasan Urusan Wajib

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib yang melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur

b. Program Kebinamargaan

- Perencanaan Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jalan
- Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Pembangunan Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- Inspeksi Kondisi Jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Inspeksi Kondisi Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium
- Pembangunan Jalan (DAK)
- Eskalasi Jembatan Baturusa II Paket 1 dan 2
- Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka

c. Program Pengembangan Sumber Daya Air

- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Banjir
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- Penyusunan Regulasi Air Permukaan
- Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)

- d. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
 - Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
 - Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
 - Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
- e. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- f. Program Pengawasan dan Peralatan PUPR
 - Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

-

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	JumlahCpns	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	8
		Gol. III	102	-	102
		Gol.II	42	-	42
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-		
		S2	22	-	22
		S1/D. IV	71	-	71
		D. III	21	-	21
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	38	-	38
		SMP/ sederajat	1	-	1
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan	Struktural:			

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	JumlahCpns	Total
	Jabatan	Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	15	-	15
		Fungsional:			
		Tertentu	7	-	7
		Umum	124	-	124
JUMLAH TOTAL			153	-	153

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	OPD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWA (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.448.817.681,24	1.558.914.000	51.409.160.281	157.576.966.028	227.993.857.931,24	220.159.305.168,99	96,56	Dinas PUPR

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

(data dari Biro Pemerintahan)

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana Dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
		√	

8. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

- Kurangnya informasi data sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan.
- Kurangnya Sumber daya Manuasia yang berkompeten pada bagian Perencanaan, Penataan Ruang dan Tenaga Teknik.

2. Solusi

- Disetiap bidang harus membuat data base dan menunjuk seorang staf khusus untuk mengolah data.

- Mengajukan permintaan Sumber Daya Manusia yang ahli dan berkompeten pada bagian perencanaan, penataan ruang dan tenaga teknik.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1.1. Tugas Pembantuan Bina Marga

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : DIPA – 033.04.4.309036/2018

b. Instansi Pemberi TP

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

c. Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	10.875.040.000	10.738.079.000,-

d. OPD yang melaksanakan TP

OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Pegawai

TP Bina Marga

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV Gol. III Gol.II Gol. I	- 9 4 -	- - - -	- 9 4 -
II	Berdasarkan Pendidikan	S3 S2 S1 D. IV D. III D. II D.I SMA / sederajat SMP / sederajat SD / sederajat	- 2 7 - - - - 3 - -	- - - - - - - - - -	- 2 7 - - - - 3 - -
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural - eselon II - eselon III - eselon IV Fungsional	- 1 1 -	- - - -	- 1 1 -

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana mencukupi.

g. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam hal pelaksanaan dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan mencapai 98,74% dan fisiknya 100%.

1.2. Tugas Pembantuan Sumber Daya Air

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : DIPA – 033.06.4.309214/2018

b. Instansi Pemberi TP

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

c. Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	2.131.786.000,- ,-	2.024.352.000,-

d. SKPD yang melaksanakan TP

SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Pegawai

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	1	-	1
		Gol. III	4	-	4
		Gol. II	4	-	4
		Gol. I	-	-	-
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	2	-	2
		S1	3	-	3
		D. IV	-	-	-
		D. III	-	-	-
		D. II	-	-	-
		D. I	-	-	-
		SMA / sederajat	4	-	4
		SMP / sederajat	-	-	-
		SD / sederajat	-	-	-
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural	-	-	-
		- eselon II	-	-	-
		- eselon III	1	-	1
		- eselon IV	2	-	2
		Fungsional	-	-	-1

f. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana mencukupi.

g. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam hal pelaksanaan dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan mencapai 94,96% dan fisiknya 100%.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional , sebanyak 8 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 7 program 	87,5%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penggunaan dan Pemakaian peralatan kendaraan dan Alat-alat Berat 2. SOP ttg Pengumpulan data kinerja 3.	Ada 2 SOP :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 	100 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 22 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 23 	95,65%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Pranata Komputer 2. Teknik Jalan dan Jembatan	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS, sebanyak 153 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5329 personil 	2,87%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 17 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 22 org. 	77,27 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 22 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 22 jbt. 	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 program. 	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 program. 	100%	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 220.159.305.168,99 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 2.596.704.155.898,11 	8,48%	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 156.356.048.903,99 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 220.159.305.168,99 	71,02%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.924.957.187,00 - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 47.957.206.050,00	18,61 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.924.957.187,00 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 220.159.305.168,99	4,05%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1 LRA 2 Neraca 3 Calk 4 LO 5 LPE	Ada, sebanyak 5 jenis : LRA, Neraca, Calk, LO, LPE	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.898.646.697.570, 50	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di mass media melalui website LPSE 3. Mobil Keliling 4. 5.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I.3 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	URUSAN	No.	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
4	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24	Jalan provinsi dalam kondisi Mantap	$\frac{711,92}{850,99} \times 100 \%$	83,66%	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
		27	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{54,37 + 32,38 + 30,95 + 25,67 + 31 + 59,77 + 11,89}{7} \times 100 \%$	35,15%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota